



**KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

PROBLEMATIKA KEMISKINAN DI ACEH & LANGKAH-LANGKAH PENGENTASANNYA

OLEH :

**Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan**

LATAR BELAKANG

- Pembangunan dapat dijalankan dengan baik bilamana didukung oleh 3 prasyarat :
 - Sumberdaya manusia yang berkualitas termasuk mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang cukup
 - Sumberdaya alam yang cukup
 - Lingkungan politik, ekonomi dan sosial budaya yang kondusif.
- Prasyarat yang tidak terpenuhi akan menciptakan hambatan dan kendala dalam pembangunan antara lain berupa :
 - Kemiskinan
 - Kesenjangan sosial dan wilayah
 - Kebodohan/keterbelakangan
 - ketertinggalan
 - Penindasan, penyalah-gunaan, KKN dsb.

- 
- Problematika kemiskinan yang dihadapi di Indonesia adalah kemiskinan multi-dimensi :

- Kemiskinan ekonomi
- Kemiskinan ilmu dan keakhlian
- Kemiskinan moral, akhlak dan mentalitas.

- Sifat Kemiskinan sudah merusak sistem dan tatanan ekonomi, sosial budaya bangsa bahkan masuk ke dalam tatanan politik terutama pada kemiskinan akan penerapan nilai-nilai yang luhur.



Arah Pengentasan kemiskinan multi-dimensi ke depan :

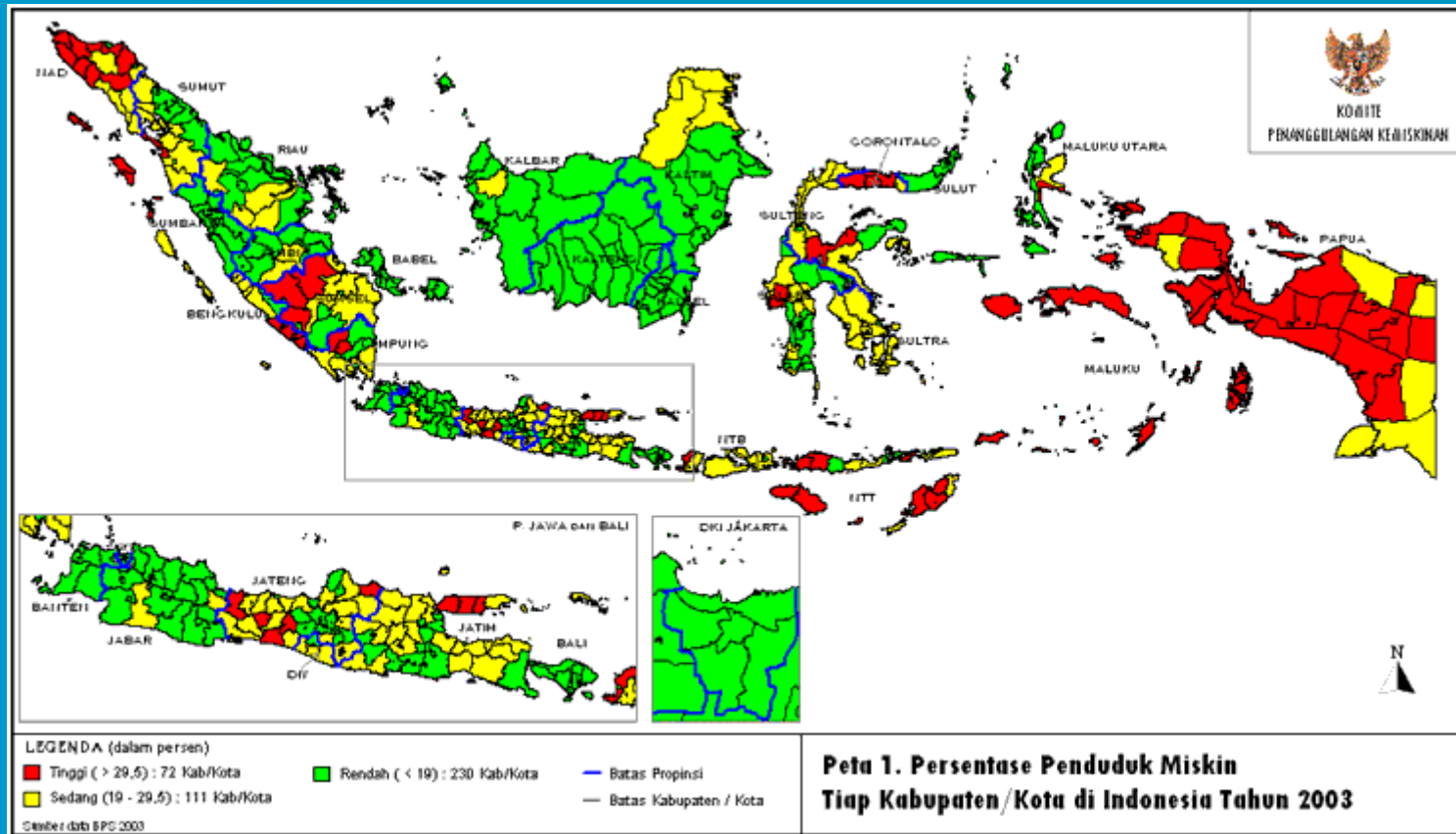
- **Kemiskinan harus ditangani dari berbagai dimensi; ekonomi, akhlak dan keilmuan.**
- **Upaya pembangunan harus berorientasi pada pembangunan manusia**
- **Pengembangan skema-skema pengurangan dan pengentasan kemiskinan yang merujuk pada prinsip dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat.**
- **Artinya ada pembagian peran masing-masing :**
 - **masyarakat yang merancang dan menjadi pelaku utama.**
 - **Pemerintah menyiapkan peluang-peluang bagi masyarakat, menjaga kebersamaan dan memelihara lingkungan dan kondisi yang kondusif**
 - **Kalangan dunia usaha menerapkan bahwa pembangunan masyarakat merupakan suatu investasi bagi keberlanjutan kegiatan usahanya**
 - **Kelompok-kelompok sosial budaya kemasyarakatan mendorong peningkatan kemampuan dan pengayaan (enrichment) kemampuan masyarakat**



PROBLEMATIKA KEMISKINAN DI ACEH

- **Akar permasalahan kemiskinan di Aceh :**
 - **Konflik yang berkepanjangan**
 - **Bencana Alam (a.l. Tsunami).**
 - **Kebijakan yang tidak berorientasi pada pengurangan kesenjangan dan peningkatan kohesi sosial.**
 - **Hambatan sosial budaya**
 - **Kurangnya dan tidak berjalannya “instrumen-instrumen” fiskal, sosial, ekonomi yang dapat mengurangi berbagai kesenjangan.**

PETA KEMISKINAN



PROFIL KEMISKINAN DI ACEH

Sebelum Tsunami

- Jumlah Penduduk : 4.297.485 Jiwa
- Angkatan Kerja : 2.538.189 Jiwa
- Tingkat Pengangguran : 11,2% (dari Jumlah Penduduk)
- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi : 3,5% per Tahun
- Struktur perekonomian didominasi oleh sektor pertanian
- Jumlah penduduk miskin 1,7 juta jiwa atau 40,39 Persen

Sumber : Bappeda NAD, 2006

PROFIL KEMISKINAN DI ACEH (2)

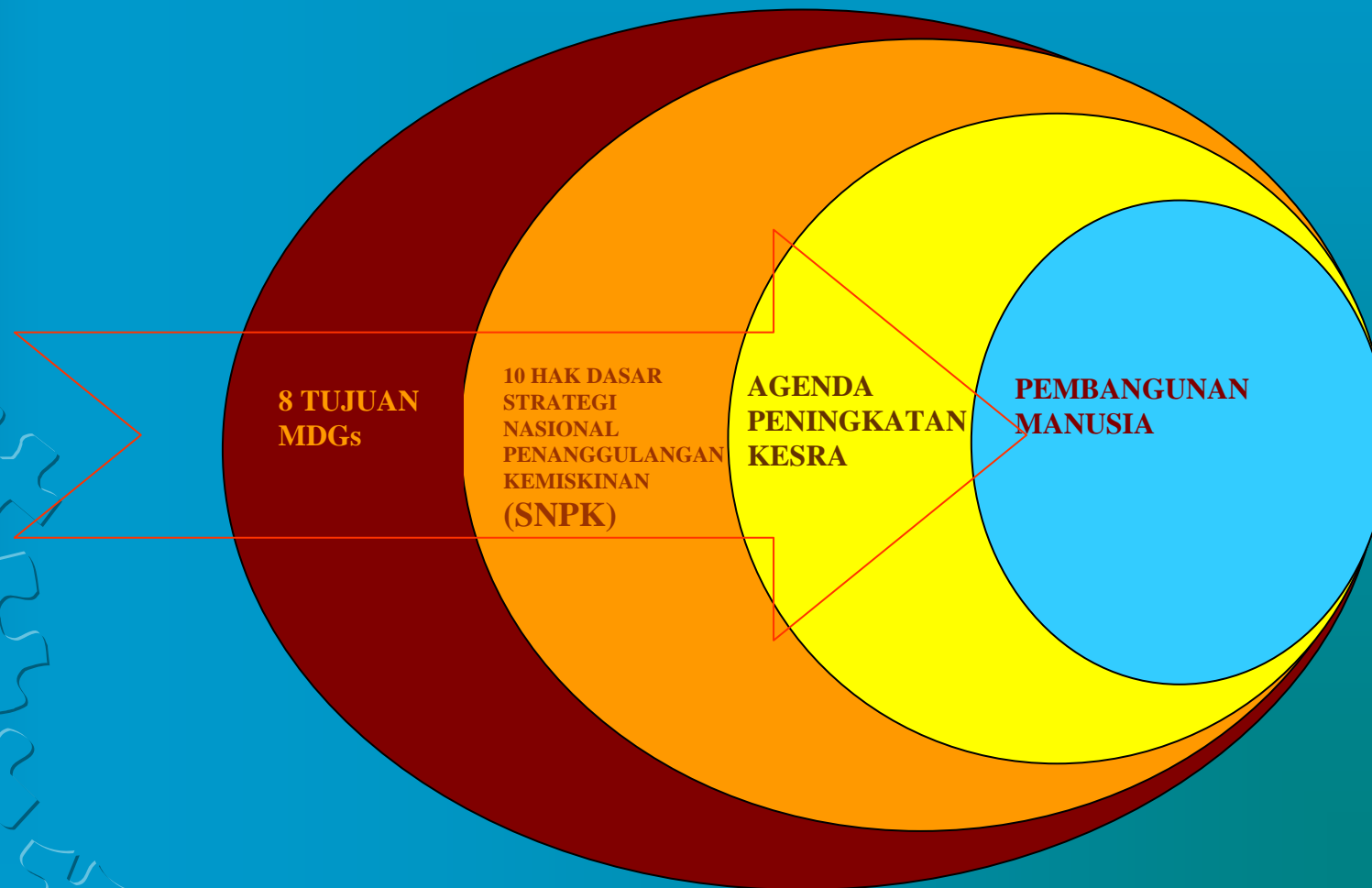
PascaTsunami

- Jumlah Penduduk 4.076.760 Jiwa
- Pertumbuhan ekonomi turun 0,25 % pada tahun 2005
- Tingkat pengangguran 11,2 %
- Pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 %
- Persentase penduduk miskin 47,8 %

ARAH PENGENTASAN KEMISKINAN

- **Pengurangan dan pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari upaya Pencapaian MDGs, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam Kerangka Pembangunan Manusia (Human Development).**

Keterkaitan antara Pembangunan Manusia, Agenda Peningkatan Kesra, SNPK, dan Pencapaian MDGs



STRATEGI OPERASIONAL PENANGGULANGAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

STRATEGI DASAR	STRATEGI OPERASIONAL
Penanggulangan Penderitaan Keluarga Miskin	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Dasar
	2. Kepedulian dan Solidaritas Masyarakat
Pemberdayaan, Pemerataan, Perlindungan dan Pertumbuhan Pro-Kemiskinan	3. Jaring Pengaman Sosial Ekonomi
	4. Pemberdayaan Masyarakat
	5. Pertumbuhan dan Pemerataan Pro-Kemiskinan
Penanggulangan Dampak Kemiskinan dan Kesenjangan	6. Penegakan Hukum, Pencegahan dan Keamanan

Fokus Agenda Peningkatan Koordinasi dalam Penanggulangan dan Pengurangan Kemiskinan

• **PENDATAAN :**

- Penegasan pemerintah kepada seluruh instansi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk menggunakan data kemiskinan dari BPS sebagai data dasar
- *Updating* data kemiskinan pada tingkat nasional, daerah dan pada tataran masyarakat
- Peningkatan akses masyarakat pada data dan informasi kemiskinan

• **PENDANAAN :**

- *Mainstreaming* penganggaran di tingkat pusat dan daerah
- Pengembangan *Poverty Reduction Trust Fund*
- Pengembangan mikrodana dan wirausaha mikro

• **KELEMBAGAAN :**

- Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang telah berkembang
- Penguatan kelembagaan lintas pelaku di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam pengurangan kemiskinan
- Keterlibatan dunia usaha dan LSM

Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005

No.	Instansi Pelaksana	Jumlah Program	Anggaran (Rp milyar)		
			DIP	PKPS BBM	Jumlah
1.	Kemenko Bidang Kesra	2	5,0	132,0	137,0
2.	BULOG	1	4.673,5	765,0	5.438,5
3.	Departemen Kesehatan	1	1.000,0	1.176,7	2.176,7
4.	Departemen Pendidikan Nasional	11	4.149,8	4.134,2	8.284,0
5.	Departemen Pekerjaan Umum	2	226,0	3.342,1	3.568,1
6.	Kemen. Perumahan Rakyat	1	200,0	400,0	600,0
7.	Departemen Sosial	1	-	250,0	250,0
8.	Departemen Dalam Negeri	2	668,8	0,0	668,8
9.	Dep. Kelautan dan Perikanan	1	104,7	0,0	104,7
10.	BKKBN	3	318,4	100,0	418,4
11.	Kementerian Koperasi dan UKM	1	-	200,0	200,0
12.	Departemen Pertanian	3	424,5	0,0	424,5
13.	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	771,1	0,0	771,1
14.	Departemen Perindustrian	3	62,3	0,0	62,3
15.	Departemen Perdagangan	5	19,6	-	19,6
16.	Kemen. Pemb. Daerah Tertinggal	2	1,1	-	1,1
17.	Kemen. Pemberdayaan Perempuan	5	2,3	-	2,3
18.	Badan Pusat Statistik	3	26,1	-	26,1
19.	Badan Pertanahan Nasional	3	-	-	Dlm konfirmasi
	Jumlah	55	12.653,2	10.500,0	23.153,2

Arah Penguatan dan Pelaksanaan 2006

- Pendataan :
 - Updating data penduduk dan keluarga miskin kerjasama Kemenko Kesra dengan BPS, sektoral, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat miskin
 - Koordinasi dengan BAKOSURTANAL dan BPS dalam pemetaan kemiskinan per daerah, per kelompok miskin dan per jenis bantuan yang diperlukan
 - Koordinasi dengan BPS dan Pemda dalam penyediaan sistem informasi yang cepat dan akurat dari daerah ke pusat dan sebaliknya serta lintas sektor.

Arah Penguatan dan Pelaksanaan 2006

• Pendanaan :

- Kerjasama Bappenas, Depkeu dan instansi terkait untuk mainstreaming proyek-proyek penanggulangan kemiskinan di pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dll. oleh Bappenas (tahun 2005 ada 55 program di 19 dep.LPND sebesar Rp 23 Triliun, tahun 2006 diperkirakan Rp 37 triliun)
- Menyusun sistem dan mekanisme Poverty Reduction Trust Fund
- Sebagai tindak lanjut MoU, bersama-sama dengan BI melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui kredit mikrodana/UMKM (tahun 2005 bussines plan perbankan Rp 60,4 triliun)
- Koordinasi dengan kelembagaan pembiayaan non-bank dalam rangka pengembangan zakat, wakaf, dll. untuk penanggulangan kemiskinan
- Bersama-sama dengan Depkeu, BI, Depdagri, Komnas Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat aturan kelembagaan keuangan mikro dengan mengkaji kembali RUU LKM yang pernah diusulkan ke DPR
- Pertemuan koordinasi regional (Indonesia wilayah barat, tengah dan timur) untuk mendorong makin banyaknya Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyediakan fasilitas mikrodana, seperti halnya BRI dalam pelayanan mikro dana yang sudah berpengalaman

Arah Penguatan dan Pelaksanaan 2006

- Kelembagaan :
 - Memperkuat kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan daerah (TKPKD) dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Saat ini sudah terbentuk 30 TKPKD Prop dan 315 TKPKD Kab/Kota.
 - Koordinasi dengan pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Departemen/LPND untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat miskin yang telah dibina dan berkembang selama ini. Saat ini ada sekitar 400.000 kelompok UPPKS-BKKBN, PPK-Depdagri, KUBE-Depsos, P2KP-Dep. PU, P4K-Deptan, PEMP-DKP, dll.)
 - Koordinasi dengan dunia usaha dan LSM dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kelompok miskin. Saat ini sudah dikembangkan Corporate Social Responsibility/CSR.
 - Menjalin Kemitraan dengan berbagai pihak baik secara individual maupun kelembagaan, internasional, nasional dan lokal untuk mengembangkan berbagai peluang bagi pengentasan kemiskinan pada kelompok masyarakat sangat miskin (the poorest among the poor)

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2007 (RKP, 2007) :

- berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,36 persen] pada akhir tahun 2007
- meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi
- berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, pelayanan KB dan kesejahteraan ibu, serta kecukupan pangan dan gizi
- meningkatnya kualitas keluarga miskin
- meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk penerbitan sertifikat tanah rumah tangga miskin, meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi

Apabila sasaran tersebut dapat tercapai, maka pada akhir tahun 2007 diharapkan Indeks Kemiskinan Manusia menurun pada tingkat 16,79.



KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (RKP 2007)

- **Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar**
- **Perlindungan Sosial**
- **Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan**
- **Perluasan Kesempatan Berusaha**



KONSEP DASAR PEMBANGUNAN MANUSIA

- **Prinsip Pembangunan Manusia**

- Manusia adalah tujuan akhir pembangunan, BUKAN alat pembangunan.
- Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia, karena
 - Menunjang pertumbuhan ekonomi
 - Memenuhi hak dan kebebasan
- Mempromosikan simbiose antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial; antara ekonomi yang maju dan politik yang sehat; antara kesejahteraan masyarakat dan individu

- Pembangunan manusia harus dipandang sebagai investasi bagi masa depan bangsa dan bukan sekedar “ongkos/spending” pembangunan.

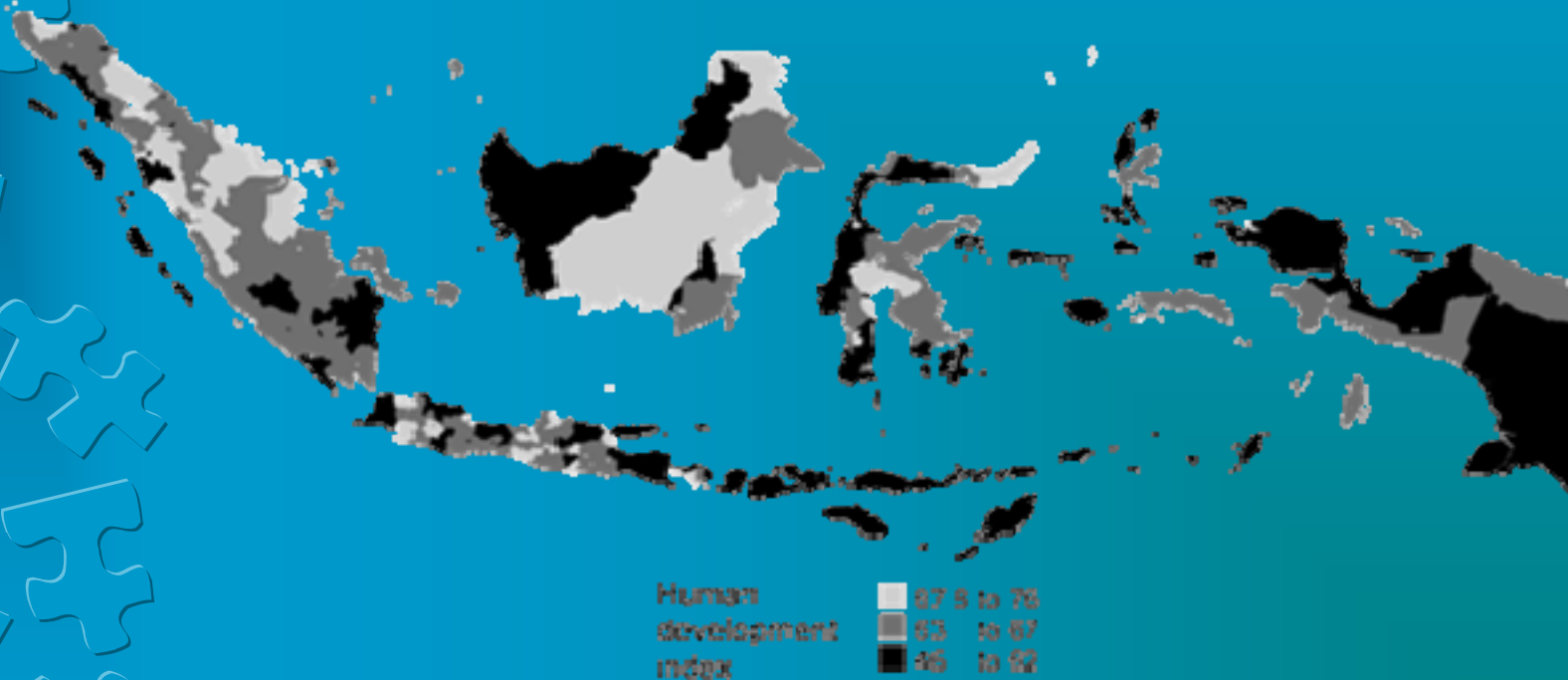
- Prinsip pelaksanaannya adalah bertumpu pada pengembangan skema-skema/ccontoh-contoh konkrit kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pembangunan manusia dengan dasar ; oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.

LINGKUP PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

- Pemenuhan Hak atas Pangan dan Penguatan Ketahanan Pangan
- Pemenuhan hak dan pelayanan atas pendidikan
- Pemenuhan hak dan pelayanan kesehatan serta kesehatan reproduksi
- Pemenuhan akan rasa aman (human security)
- Penguatan wawasan kebangsaan, kebudayaan, keagamaan dan nilai etika bangsa

Sebelum hak-hak dasar lainnya dipenuhi maka hak dan nilai dasar inilah yang perlu diwujudkan dan dipenuhi dalam rangka membangun manusia Indonesia yang lebih sejahtera, maju, mandiri dan bermartabat

Kesenjangan Pencapaian IPM per Provinsi



Sumber: LPMI 2004

Kebutuhan Dana per tahun untuk Hak-hak Warga Negara

	Pengeluaran tahunan saat ini		Kebutuhan tambahan Rp (triliun)	Pengeluaran tahunan yang dibutuhkan	
	Rp (triliun)	% PDB		Rp (triliun)	% PDB
Ketahanan pangan	4.8	0.27	-1.1	3.7	0.2
Kesehatan dasar	8.4	0.47	5.2	13.6	0.77
Pendidikan dasar	33.0	1.84	25.0	58.0	3.24
Rasa aman	7.5	0.42	20.9	28.4	1.59
Total	53.7	3.00	50.0	103.7	5.80

Sumber: LPMI 2004

Menuju Kontrak Sosial Baru Bagi Pembangunan Manusia

- Dicapai melalui **Kongres Nasional mengenai Pembangunan Manusia** yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha
...sehingga Kontrak Sosial menjadi sebuah piagam yang dibangun bersama atau *Citizen's Charter*
- Kongres nasional didahului empat pertemuan pendahuluan untuk mematangkan substansi hasil kesepakatan dan menggalang dukungan untuk memupuk *sense of ownership* di kalangan pemangku kepentingan
...sehingga Kongres menghasilkan kesepakatan yang *workable*

TUJUAN KONGRES NASIONAL PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA 2006

- Re-afirmasi komitmen nasional (pusat dan daerah) terhadap pembangunan manusia.
- Penentuan dan penegasan jaminan kebutuhan minimum bagi setiap warga negara yang harus dicapai.
- Identifikasi, inventarisasi (pendataan dan *mapping*) terhadap permasalahan-permasalahan utama dalam pembangunan manusia
- Membangun kesepakatan dan konsensus antar pemangku kepentingan dan khususnya di tingkat Pemerintah Daerah untuk memenuhi 4 (empat) Hak Dasar Manusia yaitu Hak atas Pangan, Pendidikan, Kesehatan, dan Rasa Aman serta untuk Kondisi Indonesia masa kini; penguatan wawasan kebangsaan, kebudayaan, keagamaan dan etika bangsa

JADWAL RANGKAIAN KONGRES PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA 2006

- Pra-Kongres Nasional I

Waktu : 21 - 22 Maret 2006

Tempat : Auditorium Bina Karna, Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jakarta.

- Pra-Kongres Nasional II

Waktu : 16 – 17 Mei 2006

Tempat : Manado, Sulawesi Utara

- Pra-Kongres Nasional III

Waktu : 18 - 19 Juli 2006 (*tentative*)

Tempat : Palembang, Sumatera Selatan

- Pra-Kongres Nasional IV

Waktu : 9 - 10 Agustus 2006 (*tentative*)

Tempat : Yogyakarta, DI. Yogyakarta

- Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2006

Waktu : 13 - 14 September 2006

Tempat : Jakarta



KONGRES NASIONAL PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA 2006 dan TINDAK LANJUTNYA

- **Penegasan kembali seluruh komponen masyarakat ; Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, kalangan legislatif, kalangan dunia usaha, kalangan masyarakat madani, dll untuk menyepakati agenda pembangunan manusia**
- **Penegasan kembali perwujudan pembangunan manusia di setiap daerah, di setiap lembaga dan pelaku melalui pengembangan skema-skema/model kemitraan dalam pembangunan manusia**
- **Membangun kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pembangunan manusia**
 - **Melalui ribuan skema kemitraan pembangunan manusia yang dijalankan secara serentak maka perwujudan pembangunan manusia akan lebih cepat dan mudah dicapai.**
 - **Skema kemitraan pembangunan manusia ini merupakan “sarana/obyek” untuk seluruh komponen masyarakat untuk saling bekerja sama mewujudkan tujuan bersama; mengeratkan kohesi sosial, dan mendorong seluruh komponen menjalankan upaya yang konstruktif dan bukan destruktif atau anarkhis.**

Tahapan Perwujudan Pembangunan Manusia

Perspektif lintas isu

- Pendekatan partisipatif
- Perspektif gender
- Konteks kewilayahan
- Pendekatan budaya
- Pluralisme

Diskusi kelompok tentang hak-hak dasar warga:

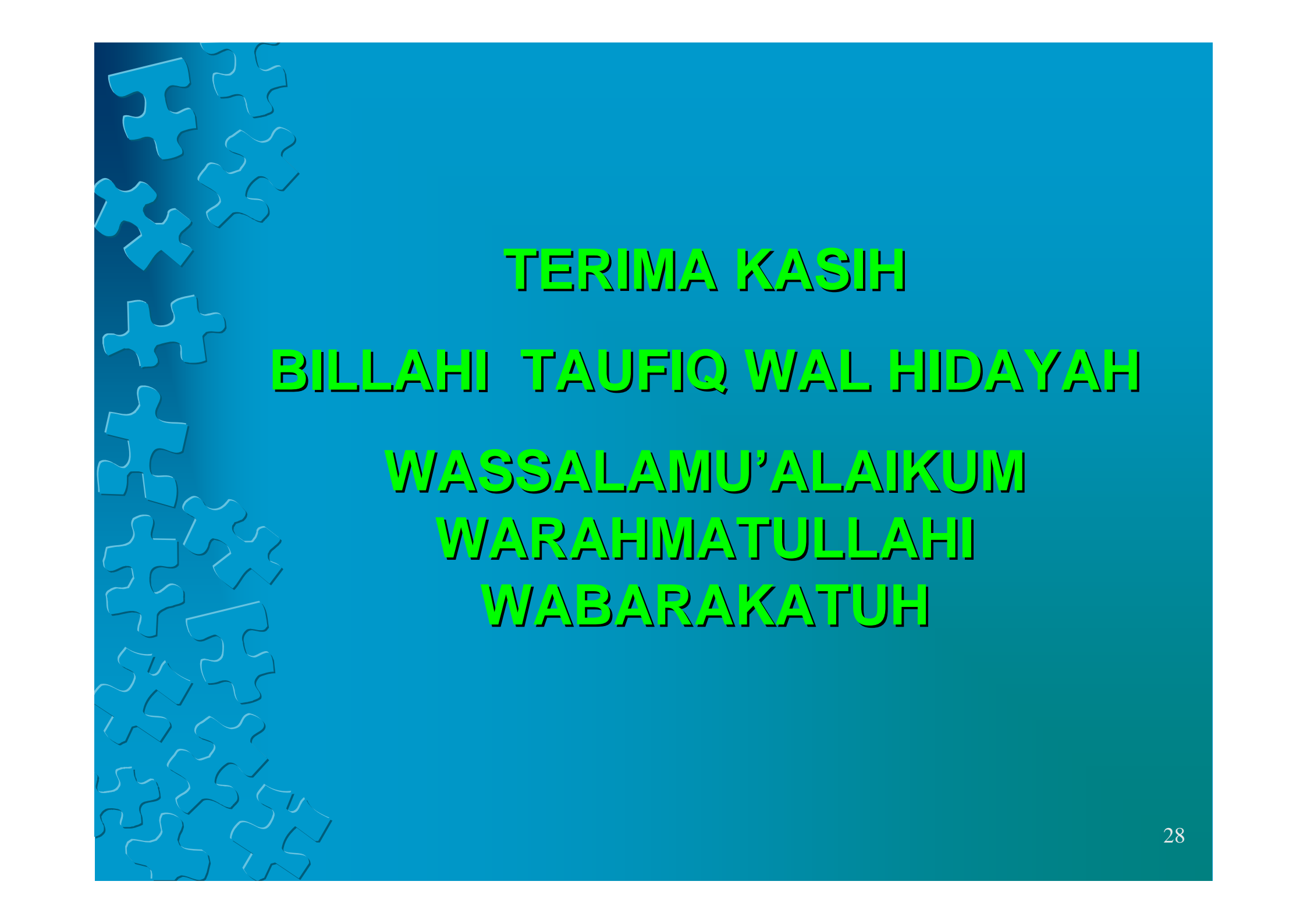
- Ketahanan pangan
- Kesehatan
- Pendidikan
- Hak atas rasa aman
- Wawasan kebangsaan, kebudayaan, keagamaan dan etika bangsa

Hasil Kongres Nasional

- Program kerja operasional
- Instrumen
- Forum dan jejaring kemitraan

Pengembangan skema-skema/model kemitraan antar pemangku kepentingan/stakeholders dalam pembangunan manusia ; dari, oleh dan untuk masyarakat

(pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan legislatif, politik, dunia usaha, cendekiawan, kalangan masyarakat madani,dll)



TERIMA KASIH
BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM
WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH